

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Rakyat Merdeka

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 6

Prihatin, Sebaran Guru Tidak Merata

KONDISI pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Kebutuhan guru, fasilitas, dan tenaga pengajar masih jauh dari harapan. Hal itu dikatakan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam seminar "Upaya Pemerintah dalam Penuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional" di kantor BPK, kemarin.

Menurut Harry, belum optimalnya kondisi pengelolaan guru tersebut terlihat dari jumlah dan distribusi guru yang belum merata. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru juga masih harus ditingkatkan, serta regulasi tentang distribusi guru belum memadai. Padahal, pemenuhan kebutuhan guru merupakan komponen utama dalam strategi pembangun pendidikan di Indonesia.

"Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karenanya, pemerintah wajib mengusahakan satu sistem pendidikan nasional," ujarnya.

Menurut Harry, negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk pemenuhan kewajiban tersebut.

Harry menyatakan, BPK akan terus mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tu-

juan negara dalam pemenuhan kependidikan tersebut. Sebelumnya, lanjut dia, pada tahun 2016 BPK juga telah melakukan pemeriksaan mengenai pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.

"Soal sarpras di daerah masih banyak yang kurang. Hampir 70-80 persen ruang kelas, perpustakaan dan toilet itu di bawah standar, 70-80 persen," kata Harry.

Harry menerangkan, ada empat jenis pemeriksaan dilakukan BPK yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan direncanakan selesai pada 2019 mendatang. Adapun fokus pemeriksaan pada 2017, yaitu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia.

"Pengelolaan guru hingga kini masih belum optimal, baik dari segi kuantitas atau kualitas kan, makanya kami lakukan pemeriksaan dengan dibantu provinsi atau kabupaten/kota untuk itu pemeriksaan," jelas Harry.

Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut, bisa menjadi perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan dana pendidikan. Selanjutnya, dia merincikan, pada tahun 2018 nanti, fokus pemeriksaan BPK yaitu mengenai pendanaan peserta didik. Serta, tahun 2019 lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. ■ QAR